

## Abstrak

**Zulviany 105251102718** *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar. (Dibimbing oleh Bapak Muhammad Ridwan dan Fakhruddin Mansyur)*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penerapan peraturan mahkamah agung tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar serta Tantangan yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya. Manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam serta analisis dokumen. Adapun hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa ; Pertama, Pengadilan agama Tingkat IA Kota Makassar dalam menyelesaikan suatu perkara berdasarkan atau sesuai pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Peraturan mahkamah agung nomor 14 tahun 2016.

Oleh karena itu dalam hal menyelesaikan suatu kasus sengketa ekonomi syariah pengadilan agama Memiliki juknis prosedur pengaduan. Kedua, Sebelum para majelis hakim memutuskan suatu perkara harus banyak pertimbangan dan tahu bukti dari masing-masing tergugat maupun penggugat agar dari putusannya nanti tidak menimbulkan putusan yang berat bagi sebelah pihak, dan secara umum prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui dua tahap yakni pra persidangan dan tahap persidangan. Ketiga Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar memandang Perlunya peningkatan Mutu dan integritas para hakim pengadilan agama Kota makassar dalam melakukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan senantiasa memberikan pelatihan yang terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam hal penanganan kasus sengketa ekonomi syariah

**Kata Kunci :** *Peraturan Mahkamah, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama*

## **Abstract**

**Zulviany 105251102718** *Application of the Supreme Court Regulation Number 14 of 2016 in the Religious Courts Class 1A Makassar City.*  
**(Supervised by Muhammad Ridwan and Fakhruddin Mansyur)**

This study aims to determine how the process of applying the Supreme Court's regulations regarding the procedures for resolving sharia economic disputes at the Religious Courts Level IA Makassar City and the challenges faced in the settlement process. The benefits in this research are theoretical benefits and practical benefits. This study uses a qualitative approach using observation data collection techniques, in-depth interviews and document analysis. The results of this study illustrate that; First, the Makassar City Level IA Religious Court in resolving a case based on or in accordance with Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts and Supreme Court Regulations Number 14 of 2016.

Therefore, in terms of resolving a sharia economic dispute case, the religious court has technical guidelines. complaint procedure. Second, before the panel of judges decides a case, there must be a lot of consideration and know the evidence from each of the defendants and the plaintiff so that the decision will not lead to a heavy decision for one party, and in general the procedure for resolving sharia economic disputes through two stages, namely pre-trial and trial stage. The three Makassar City Level IA Religious Courts view the need to improve the quality and integrity of Makassar City religious court judges in resolving sharia economic disputes by continuously providing training related to sharia economic dispute resolution so as to increase public confidence in handling sharia economic dispute cases.

**Keywords: Court Regulations, Sharia Economic Disputes, Religious Court**